

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEANDALAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur)**

INAYATI, SITI REUNI

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani
Selong, Lombok Timur

Email : reuniku09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di kabupaten Lombok Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan peneliti sehingga diperoleh sampel sebanyak 90 responden. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan teknologi informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan penyajian pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah akan meningkatkan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, keandalan penyajian laporan keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Human Resources Quality, Utilization of Information Technology and Regional Financial Supervision on the Reliability of Presentation of Local Government Financial Statements. The population in this study are employees who work on the Regional Device Work Unit (SKPD) in the district of East Lombok. Sampling technique used is purposive sampling method because the information to be taken comes from a source deliberately selected based on the criteria that have been determined by the researchers so that the sample obtained 90 respondents. The research method used in this research is quantitative method with the type of associative research. Data collection method used is by using questionnaire. The analysis used is multiple regression analysis. The results showed that the Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology and Regional Financial Supervision have a significant positive effect on the reliability of the presentation of local government financial reporting on SKPD of East Lombok Regency Government. This shows that with the improvement of Human Resource Quality, Utilization of Information Technology and Regional Financial Supervision will improve the reliability of the presentation of local government financial statements.

Keywords : Human Resources Quality, Utilization of Information Technology, Regional Financial Supervision, reliability of the presentation of local government financial reporting

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2004:18).

Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2004:18).

Mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, yaitu pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Menanggapi paradigma baru tersebut, pemerintah memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah (Mardiasmo. 2004 : 26).

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan (Mardiasmo, 2004:159). Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal. Keandalan informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantumengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa informasi yang andal memenuhi karakteristik:
 - a. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
 3. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 yang secara khusus menggunakan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja pemerintah, maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam laporan keuangan dituntut keandalan. Dengan demikian, adanya kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas keuangan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pemberian informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas keputusan baik bagi pemakai internal maupun pemakai eksternal. Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Informasi mungkin saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka kegunaan informasi tersebut dapat menyesatkan (Bastian, 2007:100).

Kualitas Informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, ditambah pemanfaatan

teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu dan memperlancar proses keandalan pelaporan keuangan daerah, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

Teknologi informasi selain teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal sehingga akan mempengaruhi keandalan penyajian laporan keuangan daerah.

Hal lain yang mungkin mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bahwa dari 511 kabupaten/kota yang ada di Indonesia hanya 116 kabupaten yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), khusus untuk Kabupaten Lombok Timur sampai dengan tahun 2013 masih memperoleh opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tetap berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menyusun laporan keuangan pada SKPD sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan, guna meningkatkan kualitas opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi target Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi lainnya (Sugiyono, 2011:8). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semua SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang berjumlah 30 SKPD dengan responden masing-masing SKPD sebanyak 3 orang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jumlah responden keseluruhan adalah 90 responden. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama satu bulan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling* karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang berjumlah 30 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 3

responden dengan kriteria Sekretaris/Kabid, Kasubag keuangan dan bendahara sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 90 responden yang didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden.

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada SKPD.
- b. Responden dalam penelitian ini adalah Sekretaris/ Kabid, Kasubag keuangan dan bendahara sehingga tiap SKPD ditetapkan secara *cluster sampling* sebanyak 3 orang yang menjadi responden.
- c. Responden ditetapkan pada Sekretaris/ Kabid, Kasubag keuangan dan bendahara SKPD. Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian dan staf bagian keuangan/akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penentuan jumlah responden masing-masing SKPD ditetapkan 3 (tiga) responden, hal ini dikarenakan:

- a. Maksimal 3 (tiga) responden pada tiap SKPD, supaya unit analisis bersifat heterogen dan persepsi responden dapat menyebar secara merata di semua SKPD.
- b. Penentuan 3 (tiga) responden pada tiap SKPD karena hanya akan melihat persepsi Sekretaris/ Kabid, Kasubag keuangan dan bendahara.
- c. Penentuan 3 (tiga) responden pada tiap SKPD didasarkan pada asumsi bahwa persepsi Sekretaris/ Kabid, Kasubag keuangan dan bendahara yang mengetahui secara pasti mengenai pelaporan keuangan pada tiap SKPD.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Lombok Timur. Variabel-variabel yang akan

diuji adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah (sebagai variabel independen) terhadap keandalan pelaporan keuangan (sebagai variabel dependen).

Variabel Dependen

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, keandalan pelaporan keuangan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2009 par 31 dikemukakan bahwa agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*).

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keandalan penyajian laporan keuangan adalah :

- a. Transaksi keuangan yang jujur dan wajar
- b. Neraca
- c. Laporan Realisasi Anggaran atau Laporan Perhitungan APBD
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan
- f. Informasi dapat di uji
- g. Rekonsiliasi secara periodic
- h. Informasi untuk kebutuhan umum

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah.

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM)

Menurut Aritonang dan Syarif (2009), persaingan dalam Sumber Daya Manusia sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas Sumber Daya Manusia dari setiap organisasi, baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya. Kualitas Sumber Daya

Manusia ini diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Pengetahuan disini dimaksudkan dalam arti luas yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia yang tercermin dari kinerjanya dan terlihat dari perilaku kerjanya yang kompeten, cepat, dan inovatif serta dorongan yang kuat untuk belajar.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas Sumber Daya Manusia adalah :

- 1) Latar belakang pendidikan
- 2) Uraian peran dan fungsi
- 3) Peran dan tanggung jawab
- 4) Fungsi akuntansi
- 5) Sumber daya pendukung operasional
- 6) Pelatihan keahlian dalam tugas
- 7) Sumber Daya Manusia yang berkualitas

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah :

- 1) *Software* aplikasi
- 2) Proses akuntansi secara komputerisasi
- 3) *Software* sesuai peraturan perundangan
- 4) Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
- 5) Pemeliharaan peralatan
- 6) Perbaikan peralatan yang rusak/*using*
- 7) Terdapat antivirus

c. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan,

pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal.
- b) Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
- c) Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) (Fanindita, 2010). Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran. indikator yang digunakan dalam Pengawasan Keuangan Daerah adalah :

1. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2. Evaluasi kegiatan

3. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti
4. Pencatatan transaksi yang tepat waktu
5. Dokumentasi bukti transaksi
6. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas
7. Laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan survei dengan mendatangi staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Lingkup Kabupaten Lombok Timur dan meminta bantuan kepada sampel untuk mengisi kuesioner yang tersedia. Adapun jumlah kuesioner yang dikirim sebanyak 90 kuesioner dimana jumlah kuesioner pada masing-masing SKPD tidak sama (jumlah tergantung dari ketersediaan dari masing-masing SKPD untuk mengisi kuesioner penelitian). Kuesioner akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menanyakan identitas responden. Bagian kedua berisi pertanyaan tentang variabel-variabel penelitian. Jenis pertanyaan kuesioner pada bagian kedua merupakan pertanyaan dengan skala tanggapan yang berpedoman pada skala likert. Cara pengisian kuesioner adalah dengan memilih salah satu antara angka 1 sampai dengan 5 dengan memberi tanda silang (X) yang berhubungan dengan item-item pertanyaan yang telah disediakan, sesuai dengan kondisi dalam unit kerja. Untuk menghindari keraguan responden terhadap berbagai pertanyaan yang mungkin dianggap sensitif, maka dalam surat permohonan juga diterangkan bahwa informasi dalam responden akan dijaga kerahasiaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Teknologi Informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pada SKPD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten

Lombok Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling* karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada SKPD Pemerintah Lombok Timur yang berjumlah 30 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 3 responden dengan kriteria Kasubag keuangan, bendahara dan Sekretaris/Kabid sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 90 responden.

Tabel 1
Distribusi Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner yang disebar	90	100%
Kuesioner yang kembali	90	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang dapat diolah	90	100%

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 90 buah. Kuesioner yang kembali sebanyak 90 buah sehingga yang dapat diolah sebanyak 90 buah kuesioner.

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Sekretaris/ Kabid, Kasubag Keuangan dan Bendahara sehingga setiap SKPD ditetapkan secara cluster sampling sebanyak 3 orang.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil tabulasi data, responden dilihat dari jenis kelamin pejabat pada setiap SKPD di Lombok Timur terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 50 orang (55,55%) dan perempuan sebanyak 40 orang (44,44). Hal ini

menunjukkan secara umum terdapat perbedaan jumlah para pegawai antara laki-laki dan perempuan yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada SKD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Informasi persentase jumlah pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 2
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	(%)
1	Laki-laki	50	55,55
2	Perempuan	40	44,44
	Jumlah	90	100

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, data responden menunjukkan bahwa yang mendominasi adalah responden dengan pendidikan menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan SLTA sebanyak 46 orang (51,11%) untuk lebih jelasnya mengenai keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat gambarannya pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Demografi Responden

Demografi Responden	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Tingkat Pendidikan		
SLTA	46	51,11
S1	35	38,89
S2	9	10,00
Total	90	100

Hasil Uji validitas dan Reliabilitas

Uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis Korelasi Pearson melalui aplikasi SPSS 16. Uji validitas dilakukan dengan melihat rtabel. Nilai rtabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 90, maka didapat r tabel

sebesar 0,30. Nilai rtabel yang diperoleh dibandingkan dengan nilai r-hitung untuk menguji validitas dari data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Hasil uji validitas untuk instrumen Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan daerah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid, karena r-hitung > r-tabel.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang memberikan data tentang jumlah data, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas SDM	90	3.10	7.30	5.6333	1.01472
Pemanfaatan TI	90	2.12	4.62	3.7569	.49199
PKD	90	2.86	4.86	3.8000	.47443
Keandalan	90	2.86	4.86	3.8270	.46894
Valid N (listwise)	90				

Sumber : Data primer diolah

Tabel 4 di atas menunjukkan analisis deskriptif variable kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah. Nilai maksimum untuk kualitas SDM sebesar 7.30 dengan nilai minimum sebesar 3.10. Nilai maksimum untuk Pemanfaatan TI sebesar 4.62 dengan nilai minimum sebesar 2.12. Sementara itu, untuk nilai maksimum pengawasan keuangan daerah sebesar 4.86 dengan nilai minimum 2,86.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data

Adapun hasil penelitian ini apakah data berdistribusi normal ataukah tidak dapat dilihat dari tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

	X1	X2	X3	Y
Kolmogorov-Smirnov Z	1.159	1.317	1.217	1.297
Asymp. Sig. (2-tailed)	.136	.062	.103	.069

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 5 di atas, hasil uji normalitas yang diperlihatkan oleh nilai kolmogorov-smirnov adalah lebih besar daritaraf signifikansi adalah > 0,05, maka hal tersebut menunjukkan bahwa bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat adanya korelasi antara variabel bebas. Berikut hasil uji multikolinearitas :

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.881	1.135
X2	.873	1.145
X3	.890	1.124

Sumber : Data primer diolah

Hasil pengujian multikolinearitas seperti terlihat pada Tabel 6 memberikan nilai *Tolerance* lebih dari 0,10. Berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini :

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	T	Sig.
1 (Constant)	.340	.735
X1	.350	.727
X2	-.500	.618
X3	-.356	.723

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dilihat hasil uji heteroskedastisitas untuk regresi. Tampak bahwa tidak ada variabel bebas yang mempunyai signifikansi di bawah 0,05 terhadap logaritma kuadrat residual. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model penelitian.

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan (Pengujian H₁)

Hipotesis 1 dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh kualitas SDM terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan. Tabel berikut menyajikan hasil pengujian kualitas SDM terhadap keandalan penyajian Laporan Keuangan.

Tabel 8
Regresi kualitas SDM terhadap keandalan penyajian laporan keuangan
 $Y_1 = \alpha + \beta_1.X_1 + \epsilon$

	Jumlah Responden	Nilai β	Sig.
Kualitas SDM	90	0,191	0.039

Sumber : data primer diolah

Tabel 8 menyajikan hasil regresi antara kualitas SDM dengan keandalan penyajian laporan keuangan. Tampak bahwa Nilai signifikansi pada uji t dari variabel independen

menunjukkan hasil dimana kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap keandalan penyajian Laporan Keuangan. Pengaruh yang diberikan positif hal ini ditunjukkan dari nilai *beta standardized* yang bernilai positif.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan (Pengujian H₂)

Hipotesis 2 dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan. Tabel berikut menyajikan hasil pengujian pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap keandalan penyajian Laporan Keuangan.

Tabel 9

Regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap keandalan penyajian laporan keuangan

$$Y1 = \alpha + \beta 2.X2 + \epsilon$$

Variable	Jumlah Responden	Nilai β	Sig.
Pemanfaatan TI	90	0,325	0.001

Sumber : data primer diolah

Tabel 9 menyajikan hasil regresi antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan penyajian laporan keuangan. Tampak bahwa Nilai signifikansi pada uji t dari variabel independen menunjukkan hasil dimana kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan. Pengaruh yang diberikan positif hal ini ditunjukkan dari nilai *beta standardized* yang bernilai positif.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan (Pengujian H₃)

Hipotesis 3 dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap

Keandalan Penyajian Laporan Keuangan. Tabel berikut menyajikan hasil pengujian Pengawasan Keuangan Daerah terhadap keandalan penyajian Laporan Keuangan.

Tabel 10

Regresi Pengawasan Keuangan Daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan

$$Y1 = \alpha + \beta 3.X3 + \epsilon$$

Variable	Jumlah Responden	Nilai β	Sig.
Pengawasan KD	90	0,219	0.018

Sumber : data primer diolah

Tabel 10 menyajikan hasil regresi antara variabel Pengawasan Keuangan Daerah dengan keandalan penyajian laporan keuangan. Tampak bahwa Nilai signifikansi pada uji t dari variabel independen menunjukkan hasil dimana kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan. Pengaruh yang diberikan positif hal ini ditunjukkan dari nilai *beta standardized* yang bernilai positif.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan

Kualitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Apabila Sumber Daya Manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk.

Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu,

pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Di samping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), Celviana dan Rahmawati (2010), Lismawati (2012), Ariesta (2013), Sembiring (2013), Marda (2013), Sari dan Witono (2014), yang menemukan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Arfianti (2011), menemukan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih andal dan tepat waktu.

Hipotesis 2 dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), Arfianti (2011), Ariesta (2013), Sembiring (2013), Sari dan Witono (2014), yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (PTI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Namun bertentangan dengan penelitian Marda (2013), yang menemukan pemanfaatan teknologi informasi (PTI) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Pengaruh antara pengawasan keuangan daerah dengan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah bahwa semakin baik pengawasan keuangan daerah maka keandalan penyajian laporan keuangan daerah juga akan tercapai. Hipotesis 3 dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Marda (2013), yang menemukan bahwa pengawasan keuangan daerah (PKD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan, namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Arfianti (2011) dimana pengawasan keuangan (PK) tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, hipotesis penelitian, dan hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif variabel Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan. Artinya, dengan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia akan meningkatkan keandalan informasi laporan keuangan SKPD di Lombok Timur.
2. Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. Artinya, dengan adanya peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan meningkatkan keandalan informasi laporan keuangan SKPD di Lombok Timur.
3. Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif variabel Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. Artinya, dengan adanya peningkatan Pengawasan Keuangan Daerah akan meningkatkan keandalan informasi laporan keuangan SKPD di Lombok Timur.

Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi penelitian-penelitian yang sama di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan penelitian berikut ini:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada satuan kerja pemerintah daerah di wilayah Lombok Timur, sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini kurang dapat diberlakukan bagi daerah di luar wilayah Lombok Timur.
2. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner, sehingga kemungkinan karakteristik dan pendapat responden tidak tertangkap secara nyata. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang dapat memperluas cakupan

wilayah penelitian yang lebih luas dan dikembangkan dengan menggunakan metode eksperimen atau metode kualitatif. Penelitian selanjutnya juga harus mempertimbangkan perubahan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah dan mempertimbangkan tinjauan tentang pentingnya pemahaman akuntansi bagi aparat pemerintah daerah yang melakukan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ariesta, Fadila. 2013. Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Celviana dan Rahmawati (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten). *Simposium Nasional Akuntansi 13*. Purwokerto.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005*. BPF, Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. BPF. Yogyakarta.

- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Lismawati. 2012. Pengaruh Kemampuan Sumber daya Manusia terhadap Keterandalan dan ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*. Volume 04 No. 04 Juli-Desember
- Marda, Gita Silvia. 2013. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai. *Skripsi*. UR.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sari, Shinta Permata, dan Banu Witono. 2014. Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Sancall*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sekaran, Uma. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sembiring, Febriady Leonard. 2013. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.